



# **RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) TAHUN 2016 - 2021**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS**

**Jalan Antara Nomor 445 Bengkulu**

**Website : [www.kesbangpol.bengkalis.go.id](http://www.kesbangpol.bengkalis.go.id)**

**Email : [kesbangpolbks@yahoo.com](mailto:kesbangpolbks@yahoo.com)**





## KA T A P E N G A N T A R

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 - 2021 ini telah dapat diselesaikan secara baik dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 - 2021.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah ini sebagai tindak lanjut periode Renstra 3 (tiga) Tahun berjalan dan masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang harus diakomodir sehingga penyusunan awal dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dapat tercapai pada periode masa Renstra 2016-2021.

Rencana Strategis ini menyajikan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah setiap tahunnya yang disertai pagu indikatif mencakup target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Bengkulu Tengah pada akhir masa Renstra sekaligus menjadi referensi capaian pada akhir periode RPJMD 2016 - 2021.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Revisi Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bengkalis, Juli 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS

  
Drs. H. HERMANTO, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630310 198702 1 002



**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL .....	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
2.2. Sumber Daya .....	12
2.3. Kinerja Pelayanan .....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK .....	27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpol .....	27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	40
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga .....	45
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	51
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	53
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	59
BAB VII PENUTUP .....	61

LAMPIRAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) adalah serangkaian kegiatan atau proses yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, rencana disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan baik skala nasional, regional maupun lokal dengan melakukan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) termasuk peluang dan kecendrungan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Didalam Peraturan Pemerintah ini memuat tentang tatacara revisi pada dokumen perencanaan pada tingkat kementerian dan lembaga baik pada tingkat pusat, provinsi maupun pada tingkat kabupaten.

Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Komitmen dari segenap jajaran organisasi dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon terhadap perubahan lingkungan. Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi dimaksud mencakup berbagai upaya atau langkah yang dirancang agar tercapai tujuan dan sasaran.



Strategi tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan sepanjang tahun. Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap SKPD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar terciptanya akuntabilitas dan peningkatan kinerja SKPD.

Dokumen revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat revisi dari dokumen Renstra awal untuk periode 4 (empat) tahun kedepan. Revisi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik selama kurun waktu tahun 2016-2021 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah mengalami revisi.

Proses penyusunan revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2018 dilakukan melalui tahapan yaitu :

- a. Persiapan penyusunan revisi Renstra Badan Kesbangpol
- b. Penyusunan rancangan revisi Renstra Badan Kesbangpol
- c. Penyusunan rancangan akhir revisi Renstra Badan Kesbangpol
- d. Penetapan revisi Renstra Badan Kesbangpol

Penyusunan revisi ini dilakukan oleh tim penyusunan Renstra yang beranggotakan beberapa pejabat struktural dan staf di lingkungan sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan.

Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2016-2021 menyelaraskan dengan dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Revisi Renstra yang disusun diupayakan pada penyelarasan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, prioritas, sasaran, program, kegiatan pembangunan tahunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum lingkup Kementerian Dalam Negeri.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum proses dan prosedur tentang penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis serta dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan dokumen Renstra ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2004 Nomor 22);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005 Nomor 17);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 03);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 Tanggal 28 Desember 2016.



21. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan;
22. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan, Nomor 70/KPTS/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 - 2021 Tanggal 27 Januari 2017.-

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan adalah menyediakan dokumen urusan kesatuan bangsa dan politik sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan. Serta sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi misi dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan sampai kurun waktu 5 tahun kedepan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016–2021 adalah :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan sampai akhir periode Renstra pada tahun 2021.
2. Menetapkan strategi, kebijakan, program serta kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
3. Sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja, dan
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan kinerja.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 terdiri dari :





- BAB I. PENDAHULUAN**, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan.
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS**, menguraikan gambaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan terkait tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan ke depan.
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS**, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, melakukan telaah terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah terhadap renstra K/L dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, telaah RTRW dan KHL, serta penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**, menjabarkan tujuan dan sasaran guna pencapaian visi dan misi tersebut dan dalam rangka untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam lima tahun mendatang.
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** menjabarkan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**, pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif.
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, pada bagian ini di sajikan indikator kinerja Badan kesbangpol mengacu kepada RPJMD periode 2016-2021.
- BAB VIII. PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Landasan kerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 dan Nomor 03 Tahun 2016 setelah disesuaikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2016 Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu masih tetap melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.



Setiap komponen dalam susunan organisasi yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan satu kesatuan yang sinergis untuk mewujudkan misi dan visi yang telah dirumuskan dengan berpedoman pada tugas dan fungsi yang dibagi habis pada setiap komponen yang ada secara berjenjang.

Adapun susunan struktur organisasi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan kewaspadaan Nasional, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
4. Bidang Penanganan Konflik, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Penanganan Konflik
  - 2) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
5. Bidang Politik, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Demokratisasi dan Pendidikan Politik
  - 2) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi, Partai Politik dan Pemilu

**A. Kepala Badan,** mempunyai tugas:

1. Memimpin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
2. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.



3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. Sekretaris**, mempunyai tugas pokok yaitu memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan tata usaha.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyusun rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik;
3. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
4. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat;
5. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang, dan;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala.

**C. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional dan melaksanakan penguatan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan pengembangan kebangsaan.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.



- 4) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

**D. Bidang Penanganan Konflik, Ketahanan, Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi**, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan model penguatan ketahanan sebutkami di daerah, dan menciptakan situasi dan kondisi daerah yang kondusif dengan memberikan pelayanan serta melakukan klasifikasi potensi-potensi konflik dan istimasi yang harus dilaksanakan serta melakukan identifikasi, koordinasi dan konsultasi dini penanganan konflik yang terjadi di masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya Kepala Bidang PKK Sebutkami mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan penyiapan program di bidang PKK Sebutkami di daerah.
2. Penyusunan rencana operasional kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan PKK Sebutkami di daerah.
3. Melaksanakan fasilitas PKK Sebutkami di daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan konflik dalam masyarakat.
5. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang PKK Sebutkami.
  - a. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung baik tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

**E. Bidang Politik**, mempunyai tugas pokok menghimpun data , menyiapkan bahan, mengkoordinasikan tugas dalam rangka penyusunan program dan fasilitas penyelenggaraan/pelaksanaan PEMILU serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang hubungan partai politik.

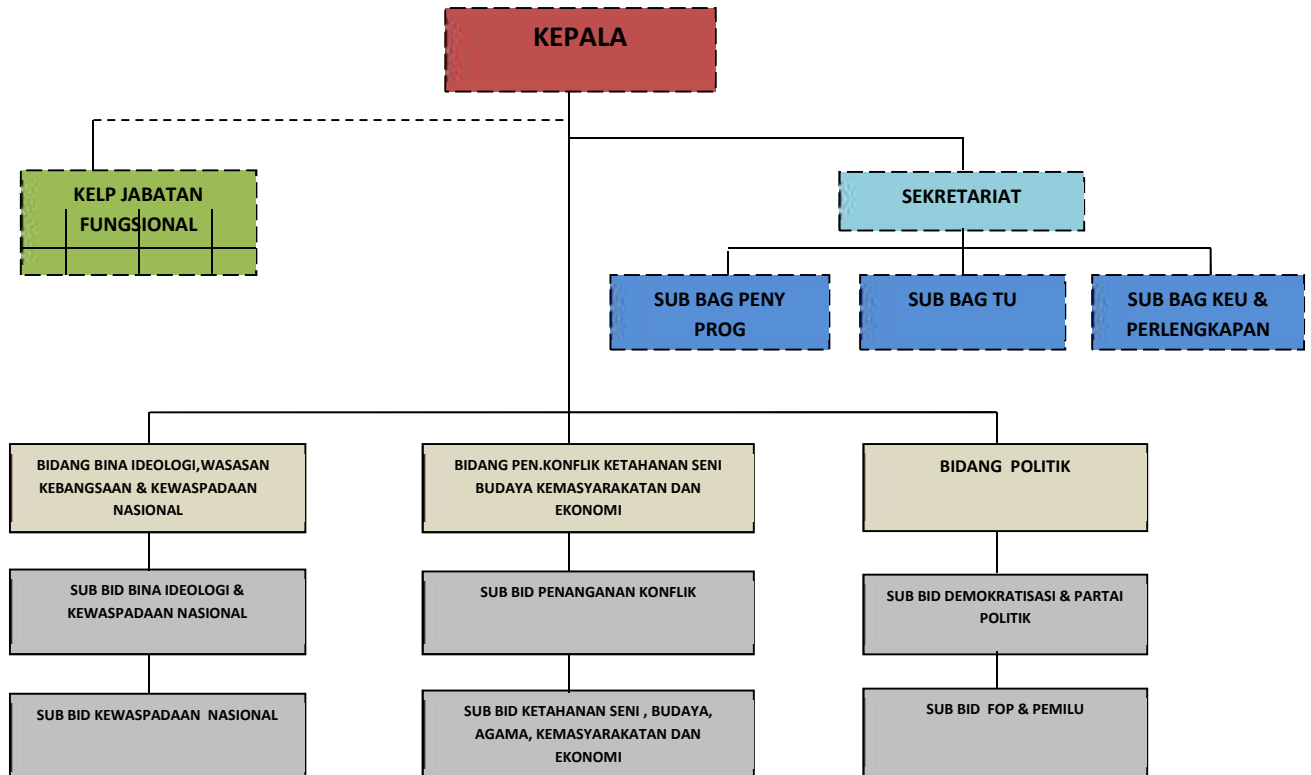
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Politik juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang hubungan politik.
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang hubungan partai politik.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang hubungan partai politik.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan bidang tugasnya



Susunan Organisasi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu berdasarkan Pasal 12 Perda Nomor 2 Tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS



Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ikut berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan. Secara umum dapat digambarkan bahwa Badan Kesbang dan Politik merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Bupati/Kepala Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Selanjutnya secara rinci dipaparkan tugas pokok dan fungsi setiap komponen dalam susunan organisasi yang digambarkan di atas.



## 2.2 Sumber Daya Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu didukung oleh 40 orang Pegawai terdiri dari 37 orang PNS, 2 orang non PNS (K2) dan 1 orang Tenaga Akuntansi seperti yang tercantum pada Tabel dibawah ini.

### Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu

No	J a b a t a n	Jumlah (Orang)
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Subbagian	3
5	Kepala Subbidang	6
6	Staf Sekretariat	7
8	Staf Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional	4
9	Staf Bidang Politik	4
10	Staf Bidang Penanganan Konflik, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	8
11	Honorar K2	2
12	Tenaga Akuntan	1
	<b>J u m l a h</b>	<b>40</b>

Berdasarkan pendidikan dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



**Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah  
Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2	9
2	Strata 1	13
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	13
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	2
	<b>Jumlah</b>	<b>37</b>

Bila dilihat dari jenjang pendidikannya, maka struktur pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Golongan adalah sebagai berikut :

**Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah  
Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	8
2	Golongan III	22
3	Golongan II	5
4	Golongan I	2
	<b>Jumlah</b>	<b>37</b>





Guna mendukung program dan kegiatan yang ada didukung oleh pejabat yang berkompeten, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Eselon**

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	9
4.	Staf	23
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>

**2.2.2 Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Selatan**

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Daftar sarana dan prasarana  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Uraian Nama Barang	Jumlah
<b>I</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>520</b>
<b>I.</b>	<b>Alat-alat Angkutan</b>	<b>20</b>
1.	Sedan	3
2.	Station Wagon	4
3.	Pick Up	1
4.	Sepeda Motor	12
<b>II</b>	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>457</b>
1.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	5



2.	Mesin Ketik Elektronik	4
3.	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa double folio	5
4.	Lemari Besi	1
5.	Filling Besi/Metal	28
6.	Brankas	2
7.	Lemari Kaca	11
8.	Lemari Kayu	7
9.	Papan Visual	1
10.	Alat Penghancur Kertas	10
11.	White Board	3
12.	Overhead Projektor/Infocus	2
13.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1
14.	Genset	2
15.	Lemari Kayu	4
16.	Meja Rapat	59
17.	Meja Tambahan	1
18.	Kursi Rapat	29
19.	Kursi Tamu	4
20.	Kursi Tangan	30
21.	Kursi Putar	47
22.	Meja Komputer	10
23.	Meja Biro	46
24.	Mebeleur Lainnya	1
25.	Jam Mekanis	7
26.	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1
27.	Mesin Potong Rambut	1



28.	Lemari Es	1
29.	AC Unit	14
30.	AC Split	3
31.	TekoListrik	2
32.	Televisi	10
33.	Loudspeaker	1
34.	Sound System	1
35.	Wireless	1
36.	Dispenser	5
37.	Mimbar/Podium	1
38.	Handy Cam	1
39.	Alat Rumah Tangga Lainnya	7
40.	PC Unit/Komputer PC	22
41.	Laptop	15
42.	Printer	32
43.	CPU	2
44.	Monitor	4
45.	Keyboard	2
46.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1
47.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
48.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4
49.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	13
50.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10
51.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3
52.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	16
53.	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1



<b>III</b>	<b>Alat Studio dan Alat Komunikasi</b>	<b>15</b>
1.	Microphone/Wireless Mic	1
2.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2
3.	Tripod Screen	1
4.	Wall Screen	1
5.	Camera Electronic	3
6.	Photo Tustel	1
7.	Faxsimile	2
8.	Antena SHF/Parabola Portable	1
9.	Mas Tower	1
10.	Switcher/Menara Antena Lain-lain	2
<b>IV</b>	<b>Alat Laboratorium</b>	<b>26</b>
1.	Meja Kerja	19
2.	Papan Alphabet	1
3.	Lampu Pijar	5
4.	Proteksi Lingkungan Lain-lain	1
<b>V</b>	<b>Alat-alat Perenjataan/Keamanan</b>	<b>5</b>
1.	CCTV	5



### 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu

Kinerja pelayanan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu dapat diuraikan sebagai berikut :

#### Kinerja pelayanan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu

No	Bidang	Ruang Lingkup
(1)	(2)	(3)
1	Politik	Sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten/Kecamatan
2	Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional	Kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, Bela Negara, pemantauan orang asing, pekat skala Kabupaten / Kecamatan
3	Penanganan Konflik, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Penanganan konflik sosial, kebijakan dan ketahanan masyarakat, organisasi kemasyarakatan skala Kabupaten/Kecamatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu adalah SKPD yang menyelenggarakan pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati. Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu selama 5 (lima) terakhir dalam Pemantauan



Masalah Strategis, Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan dan Wawasan Kebangsaan.

Dalam pengembangan pendidikan politik masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir telah melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan politik. Karena pendidikan politik adalah suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik merupakan salah satu alternatif proses demokratisasi di negara kita untuk menyadarkan bahwa demokrasi merupakan salah satu alat atau sarana efektif dan efisien bagi perwujudan kesejahteraan di setiap aspek kehidupan masyarakat dan desa.

Pendidikan politik yang dilaksanakan melalui sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan politik kepada masyarakat maupun kepada partai politik, penyebaran informasi politik serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada. Dari aspek penguatan integrasi nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan program dan kegiatan yang terkait aspek penguatan integrasi nasional mencakup : penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, pembinaan kerukunan umat beragama serta pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Pembinaan dan penguatan peran LSM/Orkemas setiap tahun dilaksanakan melihat dengan semakin bertambahnya jumlah LSM/Orkemas yang terbentuk di Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun bentuk pembinaan terhadap LSM/Orkemas yang telah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan politik bagi elemen masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman fungsionaris parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam berpolitik dan berorganisasi di masyarakat
2. Pembinaan Ormas dan LSM di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan LSM dan Ormas
3. Sosialisasi Peraturan tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan tentang Orkemas.



**Jumlah LSM/Orkemas, Yayasan yang Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011–2015**

No	Tahun	LSM	Jumlah
1	2011	412	412
2	2012	168	168
3	2013	22	22
4	2014	26	26
5	2015	14	14

Dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat terhadap penyakit masyarakat, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai minuman keras dan narkoba. Untuk deteksi dini konflik selalu dilaksanakan rapat-rapat koordinasi melalui forum komunitas intelijen daerah yang hasil rekomendasi dari forum komunitas intelijen daerah menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan untuk mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi.

Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Table 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah LSM yang dibina	Jumlah	546	Terlaksananya pembiayaan kepada LSM	300	350	300	250	200	412	168	22	26	14	137	48	7,3	10,4	7



2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Jumlah	0	Terwujudnya bentuk kegiatan pembinaan kepada masyarakat	235	360	475	680	825	0	50	0	266	2	0	13,8	0	39	0
3	Kegiatan pembinaan politik daerah	Jumlah	364	Terwujudnya pendidikan politik masyarakat	0	1302	1706	1726	1774	0	225	1200	2120	0	0	17	70,3	122,8	0
4	Jumlah Demo	Jumlah	4	Menu runya potensi konflik	3	3	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan masa Renstra Tahun 2011-2015, indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Kesbang dan Politik dapat tercapai terhadap indikator :

1. Jumlah LSM yang dibina dengan target 300 pada tahun 2011, terealisasi sebanyak 412 LSM yang dilakukan pembinaan. Hal ini tentu saja telah melebihi dari target awal indikator dengan kesimpulan bahwa pada indikator kinerja ini pelayanan tercapai maksimal. Hal ini disebabkan keseriusan aparatur Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan sosialisasi tentang Ketentuan dan Peraturan tentang ORMAS.
2. Kegiatan pembinaan politik daerah dengan target 1774 pada tahun 2015, terealisasi sebanyak 2120 jumlah pembinaan pendidikan politik. Hal ini juga melebihi dari target awal indikator, kesimpulannya indikator kinerja ini tercapai maksimal. Hal ini juga disebabkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan politik dan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu.
3. Indikator kinerja kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP pada tahun 2011 dan 2013 tidak terealisasi disebabkan anggaran untuk kegiatan dimaksud tidak tersedia.
4. Indikator kinerja jumlah demo sesuai target pada tahun 2011 s/d 2015, realisasinya tidak ada sama sekali mengingat kegiatan demo bersifat situasional.





**TABEL 2.2**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD**

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,233,564,950	1,225,027,321	1,214,268,320	1,161,876,000	1,497,743,600	1,074,902,199	798,796,741	885,281,199	1,080,464,727	1,331,728,111	87.14	65.21	72.91	92.99	88.92
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	610,521,190	714,197,000	1,006,227,345	479,645,000	642,590,000	340,130,127	615,537,157	534,751,127	460,303,649	617,443,080	55.71	86.19	53.14	95.97	96.09
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	121,235,000	112,675,000	75,350,000	0	81,400,000	54,250,000	112,075,000	54,250,000	0	79,110,000	44.75	0.00	72.00	0.00	97.19
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	114,320,000	250,000,000	150,000,000	50,000,000	75,000,000	140,783,000	177,345,900	140,783,000	49,820,000	66,083,000	123.15	70.94	93.86	99.64	88.11
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	650,224,000	593,069,200	0	0	298,930,200	0	585,714,200	0	0	165,879,000	0.00	0.00	0.00	0.00	55.49
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	65,885,025	144,628,984	148,750,900	527,290,648	366,088,300	100,820,900	140,128,984	100,820,900	368,255,848	309,973,800	153.03	96.89	67.78	69.84	84.67
7	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0	225,376,749	462,057,800	0	175,306,500	209,546,500	149,011,757	209,546,500	0	135,696,544	0.00	66.12	45.35	0.00	77.41
8	Program pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	48,106,000	327,098,058	995,311,800	970,263,500	1,524,816,500	567,878,476	231,987,549	567,878,476	660,353,700	951,412,100	1,180.47	70.92	57.06	68.06	62.40
9	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	0	2,543,661,967	660,314,200	432,430,000	348,323,200	447,008,200	1,918,551,643	447,008,200	370,969,500	282,813,000	0.00	75.42	67.70	85.79	81.19
10	Prrogram Pendidikan Politik Masyarakat	264,438,400	1,516,760,871	947,629,390	2,351,217,023	2,287,416,702	890,115,374	618,012,877	890,115,374	1,496,265,375	1,775,740,352	336.61	40.75	93.93	63.64	77.63



Reviu Renstra Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis 2016-2021

11	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	102,765,300	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Per tahun	3,211,059,865	7,652,495,150	5,659,909,755	5,972,722,171	7,297,615,002	3,925,434,776	5,347,161,808	3,830,434,776	4,486,432,799	5,715,878,987	1,180.47	96.89	0.00	0.00	97
	Total Per Lima Tahun					29,793,801,943					23,305,343,146			1,180.47		



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, seiring dengan dinamika serta perubahan lingkungan strategis mengharuskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan untuk lebih responsif terhadap perubahan tersebut, baik perubahan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal organisasi. Dengan demikian perubahan yang merupakan tantangan dihadapi dengan berbagai upaya dalam rangka untuk terwujudnya perbaikan secara terus menerus guna tercapainya pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Adapun tantangan yang dihadapi antara lain adalah :

1. Masih tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta peredaran miras.
2. Belum efektifnya kelembagaan politik dalam memainkan peran dan fungsinya dalam sistem politik nasional.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik dalam rangka membangun etika dan moral politik masyarakat.
4. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap nilai – nilai ideologi Pancasila dan kesadaran berperilaku berwawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai akibat dari pengaruh perbatasan dengan luar negeri.
5. Belum mantapnya ketahanan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
6. Masih signifikannya kesenjangan antar Kecamatan sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial
7. Masih lemahnya ketahanan budaya, kerukunan umat beragama dalam menghadapi globalisasi, sehingga peran FKUB belum optimal.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:



1. Meningkatnya keterbukaan komunikasi politik antar infrastruktur politik dan suprastruktur politik.
2. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
3. Berkembangnya organisasi kemasyarakatan sebagai aset pembangunan nasional.
4. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai asset budaya nasional.
5. Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan.
6. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi bahaya ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.
7. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
8. Berperannya pemuka agama, adat, tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu berbagai permasalahan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat.
9. Meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat terhadap gejolak konflik.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa sangat dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat majemuk mempunyai kerawanan sosial, politik dan kewilayahan yang mengarah kepada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horizontal yang melatar belakangi permasalahan ras, suku, budaya dan agama yang pada akhirnya dapat mengancam integrasi nasional. Kondisi kemajemukan ini juga terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan makin rendahnya kesadaran masyarakat untuk memahami arti pentingnya pendidikan politik, wawasan kebangsaan menjaga keamanan dan ketertiban dan lain sebagainya memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan.

Beberapa kecenderungan serta perkembangan situasi dan ancaman bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dan permasalahan di daerah yang mengarah pada terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa dan instabilitas daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum mantapnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila
2. Belum mantapnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan
3. Belum mantapnya proses pembauran dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan.
4. Belum mantapnya kewaspadaan dini masyarakat dalam menghadapi terjadinya potensi konflik



5. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungannya.
6. Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum.
7. Kondisi letak geografis yang terdiri dari pulau dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia serta berada ditepi alur pelayaran internasional, selat Malaka menimbulkan kerawanan bagi masuknya pengaruh asing dan peredaran gelap narkoba.
8. Belum optimalnya peran Organisasi kemasyarakatan dan LSM dalam pelaksanaan pembangunan
9. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dalam upaya mencapai visi dan misi serta tujuan strategis, maka perlu dianalisis faktor-faktor yang menjadi kelemahan dan kekuatan baik internal maupun eksternal. Analisis lingkungan internal adalah untuk melihat kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kelemahan dan kekuatan yang akan dianalisis meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

### **Analisis Lingkungan**

1. Nilai-nilai (*values*) atau kriteria tentang kebaikan dan kebenaran yang diyakini dan diterapkan dalam kehidupan organisasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sebuah organisasi pembelajaran bagi semua anggotanya adalah :
  - 1) Kebersamaan,
  - 2) Tanggung jawab,
  - 3) Responsif dan
  - 4) Inovatif



## 2. Identifikasi Faktor-Faktor Lingkungan Strategik

### a. Pencermatan Lingkungan Internal (PLI)

Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) dilakukan melalui pencermatan (*scanning*) lingkungan internal organisasi yang menghasilkan :

#### 1) Kekuatan (Strengths) :

- a) Adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta uraian tugas pokok dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b) Tersedia pejabat struktural dan pegawai pelaksana

#### 2) Kelemahan (Weaknes) :

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Terbatasnya sarana dan prasarana.
3. Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur.
4. Terbatasnya pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan yang dialokasikan pada APBD Kabupaten Bengkulu Selatan.

### b. Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE)

Pencermatan Lingkungan Eksternal dilakukan melalui pencermatan (*scanning*) lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan :

#### 1) Peluang (Opportunities) :

- a). Adanya Kebijakan nasional, daerah dan Peraturan Peraturan Perundang-undangan pembinaan wawasan kebangsaan dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila dan ketahanan nasional
- e). Adanya koordinasi dan dukungan dari organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, instansi vertikal, forum dan organisasi kemasyarakatan.



2) Tantangan (Threats) :

- a) Letak dan Kondisi geografis Kabupaten Bengkulu Selatan (sebahagian terletak di wilayah Kepulauan dan perairan ditepi Selat Malaka merupakan alur pelayaran Internasional berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia, dan sebahagian wilayahnya terletak di daratan alur lalu lintas Pulau Sumatera) memiliki potensi kerawanan gangguan kamtibmas masuknya ideologi asing, paham radikalisme dan aksi terorisme, kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang harus diwaspadai dan Era Globalisasi, kemajuan Teknologi informatika dan ketimpangan ekonomi, kemiskinan memiliki potensi kerawanan timbulnya konflik di masyarakat dan melemahkan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- c). Tuntutan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sistem politik yang demokratis.

Dari analisis lingkungan stratejik internal dan eksternal tersebut dapat dibuat pembobotan untuk mencapai faktor-faktor utama yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut :





Tabel 3.1

PERUMUSAN KESIMPULAN ANALISA FAKTOR INTERNAL ( KAFI) MELALUI PEMBOBOTAN  
PENCERMATAN LINGKUNGAN INTERNAL (PLI)

PLI	Bobot	Rating	Bobot & Rating	Score/ranking
<b>Kekuatan : (Strengths)</b>				
a). Adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta uraian tugas pokok dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan.	19	4	76	I
b). Tersedianya pagu anggaran DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan pada APBD Kabupaten Bengkulu Selatan.	14	4	56	II
<b>KELEMAHAN : (WEAKNESSES)</b>				
a) Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur	19	4	76	I
b) Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran.	18	4	72	II
c) Terbatasnya sarana dan prasarana.	17	4	68	III
d) Terbatasnya pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan yang dialokasikan pada APBD Kabupaten Bengkulu Selatan.	13	4	52	IV
Total	100	-	-	-



Tabel 3.2

PERUMUSAN KESIMPULAN ANALISA FAKTOR EKSTERNAL ( KAFE) MELALUI PEMBOBOTAN PENCERMATAN LINGKUNGAN EKSTERNAL (PLE)

PLE	Bobot	Rating	Bobot & Rating	Score
<u>Peluang : (Opportunities)</u>				
a). Adanya Kebijakan nasional, daerah dan Peraturan Peraturan Perundang-undangan tentang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. kewaspadaan dan Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.	29	4	116	I
b). Adanya koordinasi dan dukungan dari organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, instansi vertikal, dan forum dan organisasi kemasyarakatan	20	4	80	II
<u>Tantangan : (Threats)</u>				
a). Letak dan kondisi geografis Kabupaten Bengkulu Tengah, Era Globalisasi, kemajuan Teknologi informatika..	28	4	102	I
e). Tuntutan dan keinginan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sistem Politik yang demokratis.	27	4	108	II
Total	100	-	-	-

Keterangan :

Untuk memudahkan pemahaman, maka kami memberi nilai Rating sebagai berikut :

R (4) : Sangat berpengaruh, R (3) : Cukup berpengaruh, R (2) : Berpengaruh, R (1) : Kurang berpengaruh



c. Kesimpulan Analisis Faktor Internal / Eksternal:

Dari hasil pembobotan faktor lingkungan stratejik tersebut, maka diambil beberapa faktor prioritas sebagai berikut :

1) Kekuatan ( Internal) :

- a). Tersedianya Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta uraian tugas pokok dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b). Tersedianya pagu anggaran DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan pada APBD Kabupaten Bengkulu Selatan.

2) Kelemahan (internal) :

- a). Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b). Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran
- c). Terbatasnya sarana dan prasarana.

3) Peluang

- a). Adanya Kebijakan nasional, daerah dan Peraturan Peraturan Perundang-undangan pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
- b) Adanya Kebijakan nasional dan daerah serta Peraturan Peraturan Perundang-undangan tentang Kewaspadaan Nasional.
- c). Adanya Kebijakan nasional dan daerah serta Peraturan Peraturan Perundang-undangan tentang dan ketahanan nasional
- e). Adanya koordinasi dan dukungan dari organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, instansi vertikal, dan forum dan organisasi kemasyarakatan.

4) Tantangan :

- a). Letak dan kondisi geografis Kabupaten Bengkulu Selatan, memiliki potensi kerawanan terhadap wawasan kebangsaan masuknya pengaruh



Ideologi asing, paham radikalisme dan aksi terorisme, kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang harus diwaspadai.

- b. Era Globalisasi dan kemajuan Teknologi informatika memiliki kerawanan terhadap ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- c. Tuntutan dan keinginan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sistem Politik dalam negeri yang demokratis.

### 3. Analisis Strategi Alternatif Pilihan (ASAP) dan Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

#### a. Analisis Strategi Alternatif Pilihan (ASAP)

Setelah melakukan pembobotan dan menarik kesimpulan analisis faktor internal/eksternal selanjutnya dilakukan analisis SWOT untuk memperoleh analisis strategi alternatif pilihan (ASAP) : SO, ST, WO, WT. Analisis disusun kedalam matrik dibawah ini dengan mengkaitkan faktor internal dan eksternal sebagai berikut :



Tabel 3.3

ANALISIS SWOT

INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	a) Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta uraian tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan.	1. Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan. 2. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran 3. Terbatasnya sarana dan prasarana
EKSTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITIES) :	STRATEGI WO
a). Adanya Kebijakan nasional, daerah dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan pelayanan Publik.	STRATEGI SO	STRATEGI WO
TANTANGAN (THREATS)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
1. Letak dan kondisi geografis Kabupaten Bengkulu Selatan dan Era Globalisasi dan kemajuan Teknologi informatika.  2. Tuntutan dan keinginan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sistem Politik dalam negeri yang demokratis.	1. Meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi  2. Fasilitasi dan dukungan terwujudnya sistem politik yang demokratis	1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.  1. Meningkatkan kualitas Pelayanan administrasi perkantoran



Analisis Strategi Alternatif Pilihan (ASAP) :

**STRATEGI SO :**

- ✓ Implementasikan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

**STRATEGI ST :**

- ✓ Tingkatkan kewaspadaan dan ketahanan seni, budaya, agama, masyarakat dan ekonomi.
- ✓ Fasilitasi dan dukungan terwujudnya sistem politik yang demokratis.

**STRATEGI WO :**

- ✓ Tingkatkan kapasitas sumber daya aparatur.

**STRATEGI WT :**

- ✓ Tingkatkan kualitas Pelayanan administrasi perkantoran

b. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

Selanjutnya dari strategi SO, ST, WO dan WT dapat dijadikan sebagai faktor kunci keberhasilan diurutkan prioritasnya dengan keterkaitannya dengan visi, misi dan nilai sebagai berikut :



Tabel 3.4

Keterkaitan Strategi dengan Visi, Misi dan Nilai

STRATEGI	KETERKAITAN DENGAN										Uru-tan
	VISI	MISI				NILAI-NILAI				FKK	
	1	1	2	3	4	1	2	3	4		
A, STRATEGI SO											
Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	4	4	4	4	4	3	3	3	3	32 (I)	
B. <u>STRATEGI WO</u> :											
1. Tingkatkan kewaspadaan dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.	4	4	4	4	4	3	3	3	2	31 (II)	
2. Fasilitasi dan dukungan terwujudnya sistem politik yang demokratis.	4	4	4	4	4	3	3	2	2	27 (II)	
C. <u>STRATEGI ST</u> :											
Tingkatkan kapasitas sumber daya aparatur	3	3	3	3	3	3	3	3	2	26 (V)	
D. <u>STRATEGI WT</u> :											
1. Tingkatkan kualitas Pelayanan administrasi perkantoran	3	3	3	3	3	3	3	2	2	25 (IV)  21 (VIII)	



Berdasarkan hasil analisis SWOT dan urutan prioritas strategi utama, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- 1) Tingkatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- 2) Tingkatkan kewaspadaan dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- 3) Fasilitasi dan dukungan terwujudnya sistem politik yang demokratis.
- 4) Tingkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
- 5) Tingkatkan kualitas Pelayanan administrasi perkantoran

#### 4. Rencana Strategis : Tujuan Sasaran dan Strategi

##### 1. Tujuan

Dalam rangka mencapai misi yang telah dikemukakan di atas dengan mempertimbangkan hasil FKK, disusun Tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
3. Meningkatkan Fasilitasi dan dukungan terwujudnya sistem politik yang demokratis.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Meningkatkan kualitas Pelayanan administrasi perkantoran

##### 2. Sasaran

Atas dasar tujuan, ditentukan Sasaran, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Terwujudnya kewaspadaan dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
3. Terwujudnya Fasilitasi dan dukungan terwujudnya sistem politik yang demokratis.





4. Terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur.
5. Terwujudnya kualitas Pelayanan administrasi perkantoran

### 3. Strategi

Setelah menentukan apa yang akan dicapai dan kapan, maka langkah berikutnya adalah menetapkan cara bagaimana akan mencapainya maka disusun Strategi yang mencakup Kebijakan, Program dan Kegiatan. Dalam penyusunan usulan Renstra ini, Strategi dibatasi hanya sampai penetapan Program saja.

#### a. Kebijakan

1. Meningkatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan seni, budaya, agama, masyarakat dan ekonomi.
3. Meningkatkan Fasilitasi dan dukungan terwujudnya sistem politik yang demokratis.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Meningkatkan kualitas Pelayanan administrasi perkantoran

#### b. Program

1. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Kewaspadaan dan ketahanan seni, budaya, agama, masyarakat dan ekonomi.
3. Fasilitasi dan dukungan terwujudnya sistem politik yang demokratis.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Peningkatan kualitas Pelayanan administrasi perkantoran



### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 3.2.1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin masih diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 – 2021 yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang telah melalui proses teknokratis dan politik sehingga menjadi Visi Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL  
NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA”**

Tabel 3.5  
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan RPJMD 2016-2021

Misi (1)	Tujuan	Sasaran	Urusan	SKPD
1	2	3	4	5
Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas	1.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)  2.Meningkatkan kapasitas pembangunan daerah	1.Meningkatnya pelayanan publik  2.Meningkatnya keselarasan pembangunan	Fungsi penunjang lainnya - Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah



Tabel 3.6

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih (Terkait dengan SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas</p> <p>Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p>	<p>1. Belum mantapnya wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat</p> <p>2. Masih adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan peredaran miras</p>	<p>1. Kurangnya pendidikan wawasan kebangsaan sejak usia dini</p> <p>2. Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah yang terbuka terhadap pengaruh luar karena berada di jalur lintas baik secara nasional maupun internasional</p>	
	<p>Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p>	<p>1. Belum lancarnya proses pembauran bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan global</p> <p>2. Munculnya potensi konflik dimasyarakat yang berhubungan dengan wilayah perbatasan daerah, antar desa, dan kepemilikan lahan</p>	<p>1. Letak geografis Kabupaten Bengkulu Tengah yang berbatasan dengan Negara tetangga</p>	<p>1. Peran mitra Pemerintah bersama Orkemas yang meredam potensi-potensi konflik yang ada</p>



No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih (Terkait dengan SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program : Pendidikan Politik Masyarakat	<p>1. Belum mantapnya sistem politik secara nasional yang disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan peran dan fungsi lembaga-lembaga politik</p> <p>2. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun kedewasaan prilaku berdemokrasi</p>	<p>1. Jumlah partai politik yang masih banyak</p> <p>2. Sikap kurang senang atau tidak suka masyarakat akibat pengalaman dari kehidupan berpolitik</p>	<p>1. Dana bantuan bagi partai politik 60 % nya digunakan untuk pendidikan politik</p>

### 3.2.2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
2. Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 – 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai tugas pokok dan fungsinya fokus pada pencapaian misi pertama, yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang Berwibawa, Transparan Dan Bertanggungjawab Serta Dapat Melaksanakan Kepemimpinan Dengan Bijak, Berani dan Ikhlas.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2016-2021, maka dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

**“Terwujudnya Kesatuan Bangsa yang Kokoh dan Sistem Politik Demokratis yang kondusif di Kabupaten Bengkulu Selatan”**

Penjelasan Visi, Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan yang kokoh, kondisi keamanan, ketertiban yang kondusif dan sistem Politik yang demokratis, dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 melalui Peningkatan pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional, Meningkatkan Pembinaan kerukunan dan ketahanan, Meningkatkan pembinaan sistem Politik yang demokratis, agar terwujud pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur pancasila, wawasan kebangsaan serta terlaksananya sistem politik yang demokratis melalui terselenggaranya Pemilu yang demokratis dan peran aktif masyarakat di bidang politik.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka dirumuskan dalam beberapa Misi sebagai berikut :

**1. Meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional**

Penjelasan : Meningkatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui sosialisasi revitalisasi nilai luhur Pancasila sebagai dasar Negara, falsafah Negara, kepribadian, pandangan hidup dan dasar pemersatu bangsa dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional guna memperkuat watak dan karakter masyarakat guna pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dan menumbuhkan



kembangkan nasionalisme, cinta tanah air Indonesia, persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta senantiasa waspada terhadap berbagai gangguan dan ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**2. Meningkatkan situasi kondusif dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi**

Penjelasan : Meningkatkan Pembinaan kerukunan dan ketahanan melalui pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam rangka menciptakan kondisi suasana yang kondusif aman, damai, sejuk, menangani potensi konflik yang timbul sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki ketahanan di bidang seni, budaya, Agama, Kemasyarakatan dan ekonomi melalui sosialisasi.

**3. Meningkatkan pembinaan sistem politik yang demokratis**

Penjelasan : Meningkatkan pembinaan sistem politik yang demokratis dimaksudkan melalui sosialisasi peraturan perundangan Pemilu, koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis, langsung, umum, jujur, adil, bebas, rahasia, lancar , kondusif, aman, damai dan sejuk serta partisipasi aktif masyarakat



### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Provinsi**

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis terhadap sasaran Renstra Badan Kesbang dan Politik Provinsi Riau serta Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia / Dirjen Polpum dalam kewenangan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah.

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri/Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum**

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Mejadi POROS Jalanya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”**.

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri**

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.



## **2. Meningkatkan Pelayanan Publik**

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

## **3. Menegakkan Demokrasi**

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada ditengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga Pemerintah dalam upaya penegakan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

## **4. Menjaga Integritas Bangsa**

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran Strategis dalam

Sedangkan Misi telah ditetapkan, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokrasi serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketenteraman, dan ketertiban umum serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.





3. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam meneyeleggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berohak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan dijelaskan secara terperinci melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Dijelaskan pada Bagian ketiga Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 pada Pasal 8 ayat 1 (satu), bahwa Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri.

Pada Pasal 9 didijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Disamping penyelenggaraan tugasnya, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan umum melaksanakan fungsi sebagai berikut sesuai bunyi Pasal 10 antara lain :

1. Perumusan kebijakan dibidang politik dalam negeridan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya serta fasilitasi penanganan konflik sosial.



7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bila dilihat visi misi Kementerian Dalam Negeri diatas, sangat berhubungan erat dengan visi misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis karena substansi visi dan misi organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya yakni Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **3.3.2 Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau**

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Suasana Yang Kondusif di Provinsi Riau. Dalam mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi antara lain adalah :

1. Meningkatkan kualitas demokrasi, diarahkan untuk menumbuhkembangkan demokrasi yaitu perwujudan nilai-nilai demokrasi yang bermartabat, beretika, dan berlandaskan nilai-nilai budaya lokal.
2. Menciptakan stabilitas daerah yang aman, tertib dan kondusif, merupakan satu upaya dalam melaksanakan pencegahan potensi konflik dan peningkatan pencegahan penyakit-penyakit masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan, diarahkan pada peningkatan kualitas pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan percepatan pembangunan provinsi Riau, diarahkan untuk menggerakkan seluruh komponen dan elemen masyarakat baik LSM, Orkemas, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai mitra Pemerintah dalam mensukseskan percepatan pembangunan di Provinsi Riau.



Adapun visi Provinsi Riau tahun 2020 (Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 36 Tahun 2001), yakni **“Terwujudnya provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bahtin, se Asia Tenggara Tahun 2020”**.

Untuk mendukung pemcapaian visi dan misinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau menyusun 11 (sebelas) Program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
7. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
8. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri
9. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi
10. Program Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
11. Program Pengembangan Data/Inormasi

Bila dilihat dari uraian telaahan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau diatas, sangat jelas berhubungan erat dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, karena substansi visi dan misi organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya yakni Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.



### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 19 Tahun 2004. Pada akhir tahun 2008 atas hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan setelah 5 Kecamatan bergabung menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009.

Luas Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini adalah 777.393,02 Ha dan dibagi menjadi dibagi menjadi dua kawasan menurut pola ruang, yaitu Kawasan Lindung seluas 226.240,74 Ha (31,12%) dan Kawasan budi daya seluas 551.152,28 Ha (68,88%). Arah pola ruang nasional di Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari kawasan lindung nasional dan kawasan andalan Duri – Dumai dan sekitarnya, sedangkan arahan struktur ruang nasional terdiri dari sistem perkotaan nasional dan sistem infrastruktur nasional.

Secara umum kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan untuk :

1. Pengembangan ekonomi wilayah yang berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah dan keunggulan lokasi;
2. Pengembangan sistem perkotaan untuk mewujudkan keterpaduan wilayah daratan dengan kepulauan dalam konstelasi regional, nasional dan internasional;
3. Pengembangan kawasan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Pengembangan sarana dan prasarana dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan interaksi antar wilayah;
5. Pengembangan wilayah berwawasan lingkungan, budaya dan mitigasi bencana;

Dari Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut diharapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan kedepan adalah *Peningkatan pembinaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI*. Melalui kegiatan tersebut diharapkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan dapat terlaksana dan sejalan dengan visi misi Pemerintah Daerah.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dan melihat berbagai permasalahan yang ada ditinjau dari beberapa aspek antara lain aspek politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan/ketenteraman serta dilihat dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan selanjutnya melihat



peluang dan ancaman dari faktor eksternal SKPD dalam merealisasikan program dan kegiatan, masa waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan, ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi sehingga pelaksanaan pilkada langsung yang memberi peluang menguatnya politik aliran dalam kancah politik di daerah.
2. Masih belum optimalnya peran tokoh agama, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam menangkal terjadinya konflik sosial.
3. Masih rendahnya kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
4. Media sosial yang dapat memberikan dampak negatif bagi generasi muda sehingga mudah dipengaruhi paham radikalisme yang dapat menyebabkan semangat kebangsaan memudar.



## Bab IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang merupakan gambaran hasil akhir yang ingin dicapai. Melalui perumusan tujuan diharapkan akan lebih mudah untuk menyusun strategi atau program-program yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah menetapkan **3 (tiga) Tujuan** yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu 2016-2021, yaitu :

- 1. Melestarikan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;**
- 2. Terciptanya situasi dan kondisi yang aman dan damai ditengah masyarakat;**
- 3. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat;**
- 4. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan.**

#### 4.2 Sasaran

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah menjabarkan dalam **sasaran-sasaran strategis** yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra, yakni sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan cakupan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;**
- 2. Meningkatkan kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS;**
- 3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat;**
- 4. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan.**

Adapun tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut ini :



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Melestarikan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	1.1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila	0,40%	0,40%	0,50%	0,50%	0,60%	0,70%
			Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	0,40%	0,40%	0,50%	0,50%	0,60%	0,70%
			Persentase peran aktif masyarakat dalam peringatan hari besar nasional	40%	50%	60%	70%	80%	80%
			Persentase peran aktif masyarakat dalam peringatan hari besar keagamaan	40%	40%	50%	60%	70%	80%
2.	Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	2.1. Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	2,4%	2,5%	2,6%	2,8%	2,8%	2,8%
			Persentase peran aktif masyarakat menjaga KAMTIBMAS	2,4%	2,5%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
			Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	3,0%	3,0%	3,0%	4,0%	4,0%	4,0%





NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	3.1. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu	50%	50%	50%	50%	50%	55%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	4.1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas	C	CC	B	BB	BB	BB
			Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

**Tabel 5.1**

#### Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>VISI : TERWUJUDNYA KESATUAN BANGSA YANG KOKOH DAN SISTEM POLITIK DEMOKRATIS YANG KONDUSIF DI KABUPATEN BENGKALIS</b>			
<b>MISI 1 : Meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Tujuan 1 : Melestarikan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Strategi 1 : Meningkatkan pengetahuan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan aparatur melalui kegiatan pembinaan dan sosialisasi	Arah Kebijakan 1 : Meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan di Kabupaten Bengkulu Selatan
<b>MISI : Meningkatkan situasi kondusif dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi</b>			
Tujuan 1 : Terciptanya situasi dan kondisi yang aman dan damai ditengah masyarakat	Sasaran 1 : Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	Strategi 1 : Meningkatkan pembinaan kerukunan dan ketahanan nasional kepada kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan aparatur pemerintah melalui kegiatan rapat koordinasi, pendataan, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan : - Peraturan perundang-undangan tentang ORMAS - Pencegahan dan penanggulangan bahaya terorisme - Deteksi dini aparat	Arah Kebijakan 1 : Meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional di Kabupaten Bengkulu Selatan



		pemerintah	
<b>MISI : Meningkatkan pembinaan sistem politik yang demokratis</b>			
Tujuan 1 : Meningkatkan pembinaan sistem politik yang demokratis	Sasaran 1 : Terwujudnya pembinaan sistem politik yang demokratis di Kabupaten Bengkulu Tengah	Strategi 1 : Meningkatkan pembinaan sistem politik melalui kegiatan rapat koordinasi, bantuan keuangan kepada partai politik, pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan tentang pendidikan politik	Arah Kebijakan 1 : Meningkatkan pembinaan sistem politik yang demokratis di Kabupaten Bengkulu Tengah



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan hingga akhir periode RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 secara rinci dapat dilihat pada lampiran Renstra ini.



## **Bab VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai masa RPJMD 2016-2021, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan indikator kinerja SKPD yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai acuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pada tabel ini diuraikan indikator kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, yang menjelaskan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan SKPD sesuai kondisi kinerja pada awal periode RPJMD serta target capaian pada setiap tahun termasuk kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021.



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah penurunan potensi konflik	9	8	7	6	5	5	5	5
2	Jumlah LSM yang dibina	20	20	30	40	40	50	50	50
3	Jumlah lembaga non pemerintah yang dibina	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Tingkat partisipasi politik masyarakat	79%	79%	80%	83%	84%	85%	88%	88%



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2016-2021 disusun sebagai komitmen bersama seluruh jajaran Kesbang dan Politik dalam melaksanakan fungsi sebagai SKPD yang dikelompokkan menjalankan fungsi penunjang lainnya terkait tugas urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan sistem dan mekanisme perencanaan yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan akan lebih terarah dan berkelanjutan serta akan lebih bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan sekaligus mendukung proses pencapaian akhir visi dan misi yang telah ditetapkan SKPD dan visi dan misi Kepala Daerah.

Selain itu dengan dirumuskannya Renstra ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa yang akan datang, khususnya hingga berakhir periode RPJMD 2016-2021 dan diharapkan berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan kondisi dan lingkungan baik itu internal maupun eksternal yang terjadi secara terus menerus dapat disikapi dengan arif dan bijaksana. Dengan perumusan Rencana Strategis, perubahan yang akan terjadi dapat diprediksi, bahkan organisasi diharapkan dapat ikut mewarnai perubahan tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan sangat tergantung pada partisipasi, semangat, sikap dan mental serta disiplin dari segenap aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mulai dari tingkat pengambil kebijakan sampai pada level terendah. Untuk itu revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2021 harus dijadikan acuan bagi personil yang ada dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan pada tahun 2021.

TABEL 6.1  
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Tujuan 1 Melestarikan nilai-nilai ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Sasaran 1 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	100%	40%	-	40%	-	40%	0	0	40%	450,000,000	40%	500,000,000	100%	950,000,000	Badan Kesbangpol		
				1 Penulisan tentang revitalisasi aktualisasi dan nilai-nilai luhur dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional NKRI	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman tentang arti penting ideologi Negara Kesatuan RI dalam aplikasi kehidupan sehari-hari	0	0	0	0	0	0	0	0	440 Orang	450,000,000	550 Orang	500,000,000	940 Orang	950,000,000	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas		
				Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan/ Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan/Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan ketertiban dan keamanan/Peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan/persentase pemenuhan pendidikan politik	100%	40%	812,426,700	40%	381,160,100	40%	205,465,150	40%	55,809,000	40%	693,650,000	40%	820,000,000	100%	2,968,510,950	Badan Kesbangpol	



		Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan				1	Penyuluhan pusat pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman pendidikan wawasan kebangsaan	200 Orang	200 Orang	188,976,000	300 Orang	146,876,600	50 Orang	77,475,600	0	0	400 Orang	200,000,000	400 Orang	270,000,000		883,328,200	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas	
						2	Penyuluhan peningkatan kesadaran bela negara bagi aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	200 Orang	200 Orang	202,827,300	150 Orang	122,018,500	100 Orang	90,427,250	70 Orang	55,809,000	440 Orang	400,000,000	500 Orang	450,000,000	1460 Orang	1,321,082,050	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas	
						3	Pembekalan bagi Forum Pembauran kebangsaan	Jumlah anggota FPK yang mendapatkan pembekalan	27 Orang	27 Orang	221,068,900	27 Orang	112,265,000	27 Orang	37,562,300	0	0	0	0	0	0	0	27 Orang	370,896,200	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas
						4	Diklat pembentukan kader bela Negara	Jumlah aparatur dan masyarakat yang mendapatkan pelatihan	80 Orang	80 Orang	199,554,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 Orang	199,554,500	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas
						5	Sosialisasi gerakan nasionalisme revolusi mental	Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan gerakan nasionalisme revolusi mental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 Orang	93,650,000	500 Orang	100,000,000	1000 Orang	193,650,000	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas	



					6	Pembekalan bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah anggota FKDM yang mendapatkan pembekalan	30 Orang	30 Orang	219,773,700	30 Orang	109,551,000	29 Orang	104,111,300	5 Orang	71,133,000	20 Orang	170,000,000	20 Orang	180,000,000	134 Orang	854,569,000	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas	
					7	Pemantauan tenaga kerja asing dalam wilayah Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga kerja asing, orang asing dan organisasi asing yang terdata	0	0	0	0	0	2 Kec	37,358,900	0	0	0	0	0	0	0	2 Kec	37,358,900	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas
					8	Pemantauan orang asing dalam wilayah Kabupaten Bengkalis	Persentase pemantauan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Keg	120,000,000	1 Keg	130,000,000	1 Keg	250,000,000	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	
					9	Pembekalan bagi Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKORPAKEM)	Jumlah terlaksananya rapat koordinasi tim pembekalan bagi BAKORPAKEM	0	0	0	0	0	0	0	3 Kali	21,488,000	50 Orang	170,000,000	50 Orang	175,000,000	100 Orang	366,488,000	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas	
					10	Peningkatan efektifitas tugas FORKOPIMDA Kabupaten Bengkalis	Persentase rapat koordinasi urusan pemerintahan yang dilakukan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	350,000,000	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas	
					11	Pelatihan deteksi dini aparat pemerintah	Jumlah aparat dan masyarakat yang mendapatkan pelatihan deteksi dini	40 Orang	40 Orang	179,458,501	0	0	32 Orang	89,887,200	32 Orang	112,913,500	70 Orang	130,000,000	80 Orang	150,000,000	254 Orang	662,259,201	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	

					12	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman penyuluhan bahaya peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	300 Orang	300 Orang	267,740,600	300 Orang	267,740,600	200 Orang	166,894,000	150 Orang	131,758,500	550 Orang	450,000,000	550 Orang	500,000,000	2050 Orang	1,784,133,700	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas	
					13	Penanganan gangguan keamanan dalam negeri di wilayah Kabupaten Bengkulu	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	8 Kec	8 Kec	201,578,500	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 Kec	201,578,500	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
					14	Penanganan gangguan konflik sosial berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2012	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	0	0	0	8 Kec	179,659,000	8 Kec	88,359,300	0	0	0	0	0	0	0	8 Kec	268,018,300	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
					15	Pemetaan konflik di wilayah Kabupaten Bengkulu	Jumlah wilayah Kecamatan yang masuk dalam pemetaan	0	0	0	8 Kec	146,512,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 Kec	146,512,505	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
					16	Pemetaan dan pemantauan potensi gangguan konflik sosial berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2012	Jumlah konflik sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 Kec	150,000,000	11 Kec	165,000,000	11 Kec	315,000,000	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
					17	Rapat koordinasi Tim Terpadu Daerah Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020	Persentase rapat dan koordinasi kewaspadaan konflik sosial bersama instansi terkait	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	175,000,000	1 Tahun	325,000,000	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
		Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan			1	Pendataan dan Verifikasi dokumen pendaftaran Orkemas lingkup Pemkab Bengkulu	Jumlah verifikasi dokumen pendaftaran Ormas	20	20	-	30	56,484,500	30	44,468,900	40	49,299,200	40	48,915,790	50	54,229,120	50	253,397,510	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	

						2 Sosialisasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang Orkemas	Jumlah pengurus LSM dan masyarakat yang mendapatkan pemahaman peraturan	241 Orang	241 Orang	246,517,800	130 Orang	166,269,000	150 Orang	72,501,300	135 Orang	141,569,100	200 Orang	150,000,000	200 Orang	165,000,000	156 Orang	941,857,200	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
						3 Sistem informasi Ormas	Persentase jumlah data Ormas yang diverifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Keg	150,000,000	1 Keg	150,000,000	50 LSM	300,000,000	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
Tujuan 3	Sasaran 3																						
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase peran aktif masyarakat pada proses pemilu				<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>Persentase pemenuhan kualitas pendidikan politik masyarakat setiap tahunnya</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>830,064,000</b>	<b>40%</b>	<b>922,117,500</b>	<b>40%</b>	<b>496,671,700</b>	<b>40%</b>	<b>996,604,000</b>	<b>40%</b>	<b>4,318,843,000</b>	<b>40%</b>	<b>3,551,843,000</b>	<b>100%</b>	<b>11,116,143,200</b>	<b>Badan Kesbangpol</b>
						1 Penyuluhan kepada masyarakat tentang pendidikan politik masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman pendidikan politik	400 Orang	400 Orang	357,584,000	200 Orang	266,117,000	100 Orang	75,751,400	0	0	550 Orang	300,000,000	550 Orang	350,000,000	1800 Orang	1,349,452,400	Bidang Politik
						2 Rapat dan koordinasi tim verifikasi persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik	1. Jumlah dokumen administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada parpol 2. Jumlah partai politik	12 Dok	12 Dok	112,480,000	12 Dok	84,184,000	12 Dok	58,751,600	12 Dok	96,796,000	12 Dok	120,000,000	12 Dok	150,000,000	12 Dok	622,211,600	Bidang Politik



					8 Sosialisasi Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden kepada masyarakat	Jumlah media cetak dan elektronik	0	0	0	0	0	0	0	25305 Dok	383,101,500	0	0	0	0	25305 Dok	383,101,500	Bidang Politik	
					9 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU	Jumlah peserta yang mendapatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan Pemilu	0	0	0	0	0	0	0	200 Orang	172,182,000	0	0	200 Orang	160,000,000	400 Orang	332,182,000	Bidang Politik	
					10 Sosialisasi undang-undang bantuan keuangan kepada parpol	Jumlah fungsionaris parpol yang mendapatkan sosialisasi bantuan keuangan kepada parpol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 Orang	177,000,000	50 Orang	200,000,000	100 Orang	377,000,000	Bidang Politik	
					11 Sosialisasi pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Keg	650,000,000	0	0	100%	650,000,000	Bidang Politik	
					12 Monitoring Pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase pelaksana pemilu 2020 yang berjalan dengan baik dan lancar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Keg	250,000,000	0	0	11 Kec	250,000,000	Bidang Politik	
					13 Rapat koordinasi aparaturnya pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase rapat koordinasi dukungan aparaturnya pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Keg	500,000,000	0	0	1 Keg	500,000,000	Bidang Politik	
					14 Sosialisasi kepada pemilih pemula tentang pemilu	Jumlah pemilih pemula tingkat setingkat SLTA yang mendapatkan pengetahuan tentang Pemilu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 Orang	300,000,000	300 Orang	350,000,000	600 Orang	650,000,000	Bidang Politik	





					2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik setiap tahunnya	12 Bulan	12 Bulan	168,800,000	1.90% 2.5 Orang	106,600,000	90%	101,920,000	12 Bulan	105,100,000	90%	120,000,000	90%	120,000,000	100%	722,420,000	Sekretariat BKBP
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya	0	0	0	0	0	5 Unit	12,000,000	5 Unit	12,000,000	6 Unit	15,000,000	6 Unit	15,000,000	100%	54,000,000	Sekretariat BKBP
					4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Jumlah peralatan dan alat pembersih kantor yang disediakan dalam satu tahun 2. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang disediakan dalam satu tahun	1. 22 Item 2. 7 Orang	1. 22 Item 2. 7 Orang	147,717,800	1. 22 Item 2. 7 Orang	149,108,700	1. 22 Item 2. 7 Orang	145,504,000	1. 19 Item 2. 8 Orang	166,600,000	1. 22 Item 2. 8 Orang	165,000,000	1. 22 Item 2. 8 Orang	170,000,000	100%	943,930,500	Sekretariat BKBP
					5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pemenuhan jumlah alat tulis kantor setiap tahunnya	70 Item	70 Item	68,300,000	70 Item	66,818,800	47 Item	43,921,700	48 Item	51,516,200	70 Item	80,000,000	70 Item	90,000,000	100%	400,556,700	Sekretariat BKBP
					6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 Item	12 Item	89,998,000	12 Item	69,816,000	11 Item	36,431,400	10 Item	71,655,000	12 Item	76,000,000	12 Item	85,000,000	100%	428,900,400	Sekretariat BKBP
					7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	11 Item	11 Item	27,997,300	11 Item	27,997,300	11 Item	15,919,000	8 Item	18,881,000	11 Item	30,000,000	11 Item	40,000,000	100%	160,794,600	Sekretariat BKBP

						8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	10 Eks	12,000,000	10 Eks	9,600,000	10 Eks	12,000,000	10 Eks	12,000,000	10 Eks	16,000,000	100%	76,600,000	Sekretariat BKBP	
						9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pengadaan makanan dan minuman rapat dan tamu	11 Bulan	11 Bulan	34,500,000	594 Kotak	35,400,000	2680 Kotak	78,475,000	2700 Kotak	81,600,000	2700 Kotak	76,900,000	594 Kotak	76,900,000	100%	383,775,000	Sekretariat BKBP	
						10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	6 Orang	6 Orang	153,000,000	6 Orang	168,120,000	6 Orang	115,200,000	6 Orang	115,200,000	6 Orang	115,200,000	6 Orang	115,200,000	100%	781,920,000	Sekretariat BKBP	
						11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan kedalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	807,546,640	12 Bulan	900,000,000	100 Kali	750,000,000	100 Kali	720,000,000	100 Kali	800,000,000	100 Kali	850,000,000	100%	4,827,546,640	Sekretariat BKBP	
						12	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah tenaga sopir kantor	1 Orang	1 Orang	19,200,000	1 Orang	19,200,000	1 Orang	19,200,000	1 Orang	19,200,000	1 Orang	19,200,000	1 Orang	19,200,000	100%	115,200,000	Sekretariat BKBP	
						13	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	0	0	0	0	0	1 Media	75,985,000	1 Media	76,000,000	2 Item	76,000,000	2 Item	90,000,000	100%	317,985,000	Sekretariat BKBP	
							<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan setiap tahunnya</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>753,897,000</b>	<b>40%</b>	<b>1,010,950,000</b>	<b>40%</b>	<b>346,800,000</b>	<b>40%</b>	<b>376,525,000</b>	<b>40%</b>	<b>2,205,000,000</b>	<b>40%</b>	<b>1,180,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,873,172,000</b>	<b>Badan Kesbangpol</b>	
						1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional Kesbangpol	3 Unit	3 Unit	60,000,000	0	0	0	0	0	0	7 Unit	1,200,000,000	0	0	100%	1,260,000,000	Sekretariat BKBP	

					2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	31,575,000	1 Kegiatan	41,400,000	12 Bulan	34,375,000	3 Item	38,750,000	6 Item	60,000,000	7 Item	70,000,000	100%	276,100,000	Sekretariat BKBP	
					3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kator yang disediakan	9 Item	9 Item	161,297,000	6 Item	170,925,000	0	0	4 Item	68,125,000	8 Item	200,000,000	10 Item	250,000,000	100%	850,347,000	Sekretariat BKBP	
					4	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan	5 Unit	5 Unit	71,025,000	2 Unit	67,825,000	2 Item	19,675,000	0	0	4 Set	150,000,000	5 Set	160,000,000	100%	468,525,000	Sekretariat BKBP	
					5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan yang dilakukan	6 Item	6 Item	155,000,000	6 Item	340,800,000	2 Item	42,250,000	5 Item	16,150,000	6 Item	200,000,000	6 Item	250,000,000	100%	1,004,200,000	Sekretariat BKBP	
					6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	6 Unit	6 Unit	216,000,000	6 Unit	272,000,000	5 Unit	190,000,000	5 Unit	204,500,000	6 Unit	260,000,000	6 Unit	300,000,000	100%	1,442,500,000	Sekretariat BKBP	
					7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	12 Bulan	12 Bulan	59,000,000	7 Item	118,000,000	5 Item	35,000,000	5 Item	28,000,000	9 Item	70,000,000	9 Item	80,000,000	100%	390,000,000	Sekretariat BKBP	
					8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	0	0	0	0	0	5 Item	25,500,000	5 Item	21,000,000	9 Item	65,000,000	9 Item	70,000,000	100%	181,500,000	Sekretariat BKBP	
						<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kualitas ASN setiap tahunnya</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>100,000,000</b>	<b>40%</b>	<b>99,200,000</b>	<b>40%</b>	<b>62,000,000</b>	<b>40%</b>	<b>50,000,000</b>	<b>40%</b>	<b>150,000,000</b>	<b>40%</b>	<b>160,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>621,200,000</b>	<b>Badan Kesbangpol</b>	
					1	Bimbingan Teknis tentang Pelayanan Publik Instansi Pemerintah	Jumlah PNS yang mengikuti kursus, workshop dan seminar	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	15 Orang	99,200,000	0	0	8 Orang	50,000,000	15 Orang	100,000,000	15 Orang	100,000,000	100%	449,200,000	Sekretariat BKBP	

					2	Kursus workshop dan seminar	Jumlah PNS yang mengikuti kursus, workshop dan seminar	0	0	0	0	0	8 Orang	62,000,000	0	0	0	0	0	100%	62,000,000	Sekretariat BKBP	
					3	Operasional Unit Kearsipan BKBP Kab. Bengkalis	Jumlah arsip yang dikelola SKPD	0	0	0	0	0	0	0	800 Surat	50,000,000	800 Surat	60,000,000			110,000,000	Sekretariat BKBP	
		Predikat akuntabilitas kinerja				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase kualitas laporan perencanaan, penganggaran dan kinerja pelayanan setiap tahunnya</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>99,876,100</b>	<b>40%</b>	<b>34,467,000</b>	<b>40%</b>	<b>26,066,900</b>	<b>40%</b>	<b>62,388,500</b>	<b>40%</b>	<b>155,000,000</b>	<b>40%</b>	<b>180,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>557,798,500</b>	<b>Badan Kesbangpol</b>
					1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen renja, laporan kinerja, LPPD, LKPJ, dan Laporan Keuangan SKPD	5 Dok	5 Dok	49,879,000	5 Dok	34,467,000	0	0	0	0	0	0	0	100%	84,346,000	Sekretariat BKBP	
					2	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja, laporan kinerja, LPPD, LKPJ, dan Laporan Keuangan SKPD	0	0	0	0	5 Dok	1,586,800	5 Dok	52,444,500	5 Dok	130,000,000	5 Dok	150,000,000	100%	334,031,300	Sekretariat BKBP	
					3	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra BKBP Tahun 2016	1 Dok	1 Dok	49,997,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	49,997,100	Sekretariat BKBP	
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti			4	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Pemeliharaan Barang Unit	Jumlah laporan inventaris barang kantor Kesbangpol	0	0	0	0	12 Unit	24,480,100	3 Lap	9,944,000	3 Lap	25,000,000	5 Dok	30,000,000	100%	89,424,100	Sekretariat BKBP	
<b>JUMLAH TOTAL</b>									<b>5,174,800,340</b>		<b>4,761,176,700</b>		<b>3,210,382,150</b>		<b>3,310,938,300</b>		<b>11,004,793,000</b>		<b>9,623,143,000</b>		<b>37,085,233,490</b>		